



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025**

PROVINSI GORONTALO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Jln. Jendral Sudirman No. 52 Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Tlp (0435) 821277 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR : 029/ SPPP / 295 / V / 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Nomor 4817);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaruasi Rancangan peraturan Daerah rentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025;
 - b. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - c. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Gorontalo.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Mei 2024


MASRAN RAUF, S.STP, M.Si
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197802041996121002

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Nomor : 029/SPPP/ 295 / V / 2024

Tanggal : 3 Mei 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Masran Rauf, S.STP, M.Si	Kepala Satuan	Penanggung Jawab
2.	Ruly Lasulika, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Drs. Rivay Bumulo, M.Si	Kabid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
4.	Meni S. Doda, S.IP, MM	Plt. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
5.	Agus Maliki, S.Pd, MM	Kabid. Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6.	Yola Killis, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Azis Beiki, S.AP	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Mahmud Rizal Daipaha, S.STP	Kasie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Anggota
9.	Budiyanto Haluti, S.IP	Kasie Penyelidikan dan Penyidikan	Anggota
10.	Usman Taue	Kasie Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Anggota
11.	Jasmin Mohamad, S.IP	Kasie Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Iswan A. Hasan, SE, MM	Kasie Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat	Anggota


KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO
MASRAN RAUF, S.STP, M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
Np. 197802041996121002

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana Satpol PP diatur dalam Pasal 255 dan 256 tentang: "Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Aturan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan berpedomana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Untuk mewujudkan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggungjawab yang dilakukan sebagai Aparat Pemerintah, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan.

Rancangan Rencana Kerja ini kiranya menjadi Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bahan pembahasan RAPBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dengan DPRD.

Gorontalo, Mei 2024

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO



MASRAN RAUF, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197802041996121002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	31
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	31
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP.....	46

**DAFTAR TABEL**

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra.....	10
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.....	18
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2025 Provinsi Gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Gorontalo.....	30
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025 Provinsi Gorontalo.....	35
Tabel IV	Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	41



LAMPIRAN

1. Tabel Formulir E. 29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2025
2. Tabel Usulan Tambahan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi bagian yang tak terpisahkan sekaligus merupakan proses penetapan kegiatan Tahunan pada Tahun 2025 beserta indikator kinerjanya sesuai dengan kebijakan, sasaran, Program dan kegiatan yang mengacu ke pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Gorontalo khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo.

Dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rancangan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-



sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum adalah memuat peraturan yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;



- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); dan (Lampiran Permendagri Nomor 41);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah.
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibum Linmas;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- 25) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- 27) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dimaksudkan untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang dalam peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya antara lain perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo diikuti dengan perubahan RKPD Provinsi Gorontalo yang menjadi rujukan dalam penyusunan RENJA-OPD sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran.
 - b. Mewujudkan keinginan dan kepastian pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah dan Pembangunan antara lain mengawal dan Menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Meningkatkan Pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan dalam Lingkungan Masyarakat, serta mewujudkan Perlindungan Masyarakat.
1. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah :
 - a. Menjabarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya;
 - c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dan saling bersinergi dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kebakaran Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

BAB I :

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta



kewenangan berdasarkan pasal 255, 256 dan 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo antara lain peningkatan birokrasi dan kelembagaan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD.

1.4. Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja OPD, serta garis besar dokumen.

BAB II :

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja OPD dan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Tahun 2025.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 38 Tahun 2007.

2. 3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD berdasarkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;



- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap kesesuaian Rancangan Akhir dengan RKPD,

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo yang kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai:

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V :

PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2023 terdiri dari 3 (Tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh) sub kegiatan, adalah sebagai berikut. :

Realisasi Program dan Kegiatan dan Capaian Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian 100% dengan capaian kinerja sebesar 99,68%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, target capaian 75 Laporan dengan capaian kinerja 75 Laporan dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, target capaian 8 Lap dengan capaian kinerja 8 Lap dengan Persentase capaian sebesar 100%
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, target capaian 50 Orang dengan capaian kinerja 45 Orang dengan Persentase capaian sebesar 90%.
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, target capaian 4 Kegiatan dengan capaian kinerja 4 Kegiatan dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia, target capaian 750 Orang dengan capaian kinerja 100 Orang dengan Persentase capaian sebesar 13.33%.
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, target capaian 100 Personil dengan capaian kinerja 50 Personil dengan Persentase capaian sebesar 50%.



- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, target capaian 10 kali dengan capaian kinerja 10 kali dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, target capaian 6 Laporan dengan capaian kinerja 6 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara Lain :
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, target capaian 50 Orang dengan capaian kinerja 50 Orang dengan Presentase capaian sebesar 100%.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, target capaian 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, target capaian 24 Kejadian dengan capaian kinerja 24 Kejadian dengan Presentase capaian sebesar 100%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, target capaian 100% dengan capaian kinerja 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 1 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 1 Dokumen.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target Kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan targer Kinerja 1 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 1 Dokumen.



- c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan targer Kinerja 20 Orang dengan capaian kinerja sebesar 20 Orang.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan targer Kinerja 20 Jenis dengan capaian kinerja sebesar 20 Jenis.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan targer Kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
1	05	02	1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	100 Pelanggaran/Pengaduan	100 %	100 Pelanggaran/Pengaduan	100 Pelanggaran/Pengaduan	100



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	70 Lap	75 Lap	75 Lap	100%	75 Lap	75 Lap	100
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Kasus	6 Lap	8 Lap	8 Lap	100%	8 Lap	8 Lap	100
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	0 Org	50 Org	45 Org	90%	50 Org	50 Org	100
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100%	4 Keg	4 Keg	100



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1 05 02 1.01 05	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	0 Org	750 org	100 org	13%	750 org		
1 05 02 1.01 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	0 Prsnl	100 Prsnl	50 Prsnl	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1 05 02 1.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%		1 Laporan	100
1 05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	15 Perda/Perkada		8 Perda/Perkada	8 Perda/Perkada	28,57%	15 Perda/Perkada	15 Perda/Perkada	100
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15 Laporan	10 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	10 Kali	100
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	6 Laporan	4 Lap	6 Lap	6 Lap	100%	6 Lap	6 Lap	100



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	50 Orang		50 Org	50 Org	100%	50 Org	50 Org	100
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	0 Org	50 Org	50 Org	100%	1 Laporan	1 Laporan	100
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	4 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	100
1	05	04			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, ANtar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	24 Kejadian	24 Kejadian	24 Kejadian	100%	24 Kejadian	24 Kejadian	100
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang							



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1 05 04 1.02	Pembinaan dan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan					30 Laporan	30 Laporan	100
1 05 04 1.02 02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan					30 Laporan	30 Laporan	100
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100
01 1 01	Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	8 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	100
01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100
01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)					
01	1	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	100			
01	1	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan			39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	100			
01	1	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100	
01	1	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100
01	1	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	5 Org	20 Org	20 Org	100%	20 Org	20 Org	100	
01	1	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	20 Paket			20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Jenis	20 Jenis	100
01	1	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Jenis	20 Jenis	100	
01	1	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100	
01	1	08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yaitu sebagai berikut :

❖ Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat dan kebakaran untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

❖ Fungsi

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menyusun program pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
3. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah;
4. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam perumusan kebijakan teknis, harus melaksanakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kebakaran Provinsi Gorontalo melaksanakan penegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum



dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai dengan wewenangnya, pengawasan dilakukan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilaksanakan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, badan hukum maupun masyarakat Tabel T-C.30 menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Satpol PP Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus				
2	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			8 Laporan	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	8 Laporan				
3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen				
4	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
5	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang				
6	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen				
7	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Warga yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda			1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan				
8	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				15 Laporan	15 Laporan	16 Laporan	8 Laporan				



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
9	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				100 Pelanggaran/Penggaduan	100 Pelanggaran/Penggaduan		100 Pelanggaran/Penggaduan				
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
11	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen					
12	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
13	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50 Orang					
14	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				30 Laporan	30 Laporan	60 Laporan					
15	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen					
16	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan					
17	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan					



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
18	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan					
19	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					20 Orang	20 Orang					
20	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					20 Paket	20 Paket					
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan					
22			Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani					120 Pelanggaran / Pengaduan				
23			Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan					8 Perda/ Perkada				
24			Jumlah Satlinmas yang terlatih dan di kukuhkan					3478 dikukuhkan				
25			Jumlah Sarana Prasana Minimal yang di Penuhi					27 Jenis				
26			Jumlah SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum			6 SOP		6 SOP				
27			Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas PPNS		6 PPNS	6 PPNS		6 PPNS				



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah menyangkut kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanatkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Pergub 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo memiliki tugas yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dimaksud antara lain:

1. Isu Primordialisme, Radikalisme, Suku, Ras dan Keagamaan;
2. Kestabilan politik dalam membangun ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Gorontalo
3. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
4. Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
5. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Gorontalo yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
6. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat;
7. Belum optimalnya peran Anggota Satlinmas di daerah dalam menjaga Ketenteraman dan Ketertiban umum, bantuan penanganan Bencana dan kebakaran serta bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan;

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Bahwa pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025, prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja OPD Tahun 2025. Untuk Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat rumusan kegiatan yang akan



dilaksanakan pada Rencana Kerja 2025 mengingat bahwa ke 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan sebagai sangat penting guna menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi secara maksimal.

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



- Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Renstra OPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 3 program yang terdiri dari 10 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Dari usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut table T-C.31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Provinsi Gorontalo :



Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2025
Provinsi Gorontalo
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Akhir RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					12,278,777,615					30,202,861,550
I	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4,114,026,235	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	5.148.326.570	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	100 Pelanggaran /Pengaduan	3,319,919,322	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	100 Pelanggaran/Pengaduan	4.111.202.607	
a.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	2,334,052,804	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	3.041.362.089	
b.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Kasus	542,885,933	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan	10 Kasus	626.859.933	
c.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	10,834,371	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	10.834.371	



No	Rancangan Akhir RKPD 2025					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	137,070,425	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	137.070.425
e.	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	165,293,191	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	165.293.191
f.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	105,720,661	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	105.720.661
g.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	24,061,937	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	24.061.937
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	17 Perda/Perkada	696,731,748	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	15 Perda/Perkada	696.731.748
h.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	17 Laporan	491,715,439	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15 Laporan	491.715.439
i.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	6 Laporan	205,016,309	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	6 Laporan	205.016.309



No	Rancangan Akhir RKPD 2025					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	50 Orang	97,375,165	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	50 Orang	340.392.215
j.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	64,942,549	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	307.959.599
k.	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	4 Dokumen	32,432,616	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	4 Dokumen	32.432.616
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	100 %	455,153,848	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	100 %	544.937.448
4	Kegiatan Penyelenggaran Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	383,926,600	Kegiatan Penyelenggaran Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	473.710.200
i.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, ANtar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	353,184,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, ANtar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	353.184.000



No	Rancangan Akhir RKPD 2025					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang	30,742,600	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang	120.526.200
5.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	71,227,248	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	71.227.248
m.	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	71,227,248	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	71.227.248
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7,709,597,532	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	24.509.597.532
6.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	8 Dokumen	72,227,100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	8 Dokumen	72.227.100
n.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	37,653,450	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	37.653.450
o.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	34,573,650	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	34.573.650
7.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,248,840,150	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.248.840.150
q.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	5,149,747,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	5.149.747.200



No	Rancangan Akhir RKPD 2025					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
r.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	99,092,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	99.092.950
8.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	438,178,850	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	549.568.698
s.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	438,178,850	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	549.568.698
9.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	20 Paket	1,066,580,400	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	20 Paket	1.587.322.234
t.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1,066,580,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.587.322.234
10.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	883,771,032	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.051.639.350
u.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	883,771,032	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.051.639.350
					12,278,777,615					30,202,861,550



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIPD-RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan-usulan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya di evaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Gorontalo.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2025 terdapat pada Tabel T-C.32 berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Gorontalo

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		Usulan Pokok Pikir dari DPRD Provinsi Gorontalo
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan		
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Usulan Pokok Pikir dari DPRD Provinsi Gorontalo
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Usulan Pokok Pikir dari DPRD Provinsi Gorontalo

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, maka arah dan kebijakan Renstra yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

➤ **STRATEGI**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

- 1) Meningkatkan Pemenuhan SPM kewenangan Pemerintah Provinsi urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

➤ **ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini Arah kebijakan Satpol PP Provinsi Gorontalo 2023-2026 :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Peningkatan PPNS menuju rasio ideal sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan kemampuan perlengkapan pendukung operasi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Meningkatkan penyediaan layanan dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
4. Advokasi pemenuhan SPM Trantibum pada Pemerintah Kab/Kota
5. Kemitraan strategis antar lembaga/daerah dalam rangka perlindungan masyarakat
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat PPNS
7. Meningkatkan Patroli, Deteksi Dini pada Lokasi-lokasi prioritas Pemerintah Provinsi.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Penguatan Demokrasi Daerah
- 2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

b. Sasaran Renja

Sasaran pokok Rencana Kerja yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi
- 2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2025, Maka dirumuskan kedalam beberapa program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan yang sifatnya strategis dengan pagu indikatif sebesar Rp.**12,278,777,615.-** yang membiayai 3 Program, 10 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.114.026.235, yang membiayai 3 (Tiga) kegiatan dan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.319.919.322.-
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Paroli, Pengamanan dan Pengawasan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.334,052,804.-
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 542,885,933.-
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.10.834.371.-
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 137,070,425.-
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165,293,191.-
 - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 105,720,661.-



- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 24.061.937.-
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 696,731,748.-
 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 491,715,439.-
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 205,016,309.-
 3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 97,375,165,-
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, dengan pagu indikatif sebesar Rp.64.942.549.-
 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 32,432,616.-
- B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program ini bertujuan untuk menangani terjadinya kebakaran rumah pemukiman warga, pertokoan atau kebakaran hutan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 455,153,848.- yang membiayai 2 (Dua) kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :
4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 383,926,600.-
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 353,184,000.-
 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30,742,600.-
 5. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 71,227,248.-
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 71,227,248.-

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi Sarana Prasarana, kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja OPD, serta penataan Sistem Pengadministrasian dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi secara regular sebagai wujud pemerintahan yang baik, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7,509,597,532.- yang membiayai 5 (Lima) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan yaitu:

6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 72,227,100.-
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 37,653,450.-
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34,573,650.-
7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5,248,840,150.-
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5,149,747,200.-
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 99,092,950.-
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 438,178,850.-
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 438,178,850.-
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1,066,580,400.-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1,066,580,400.-
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 883,771,032.-
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 883,771,032.-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 diuraikan pada tabel T-C.33 berikut:



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
dan Perkiraan Maju 2026
Provinsi Gorontalo

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATPOL PP PROVINSI GORONTALO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Provinsi Gorontalo		12,278,777,615				13,690,070,157	SATPOL PP
I	Program	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	100%	4,114,026,235	APBD		100%	5,784,535,064	
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan trantibum lintas pengaduan Kab/Kota yang ditangani	Provinsi Gorontalo	100 Pelanggaran/Pengaduan	3,319,919,322			100 Pelanggaran/Pengaduan	4,897,573,353	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		100 Kasus	2,334,052,804			100 Kasus	3,133,513,874	
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		10 Kasus	542,885,933			10 Kasus	722,581,177	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		1 Dokumen	10,834,371			50 Orang	14,420,548	
d.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	137,070,425			4 Kegiatan	265,493,279	
e.	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		50 Orang	165,293,191			50 Orang	237,308,237	
f.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Keitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		2 Dokumen	105,720,661			2 Dokumen	492,229,800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		1 Laporan	24,061,937			1 Laporan	32,026,438	
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	Provinsi Gorontalo	17 Perda/Perkada	696,731,748			15 Perda/Perkada	788,283,812	
h.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		17 Laporan	491,715,439			15 Laporan	580,691,655	
i.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		6 Laporan	205,016,309			6 Laporan	207,591,157	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	Provinsi Gorontalo	50 Orang	97,375,165			50 Orang	89,778,899	
j.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		1 Laporan	64,942,549			1 Laporan	54,228,333	
	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif		4 Dokumen	32,432,616			4 Dokumen	44,450,566	
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	Provinsi Gorontalo	100%	455,153,848	APBD		100%	704,710,686	
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	383,926,600			1 Dokumen	635,208,730	
k.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, ANtar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		1 Dokumen	353,184,000			1 Dokumen	475,208,730	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		50 Orang	30,742,600			50 Orang	160,000,000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	30 Laporan	71,227,248			30 Laporan	69,501,956	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		30 Laporan	71,227,248			30 Laporan	69,501,956	
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	7,709,597,532	APBD		100%	7,200,824,407	
5.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	Satpol PP	8 Dokumen	72,227,100			8 Dokumen	117,850,867	
m.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	37,653,450			5 Dokumen	71,849,365	
n.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	34,573,650			3 Laporan	46,001,502	
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	4 Laporan	5,248,840,150			4 Laporan	4,793,183,340	
o.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/Bulan	5,149,747,200			39 Orang/Bulan	4,598,497,923	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
p.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		4 Laporan	99,092,950			4 Laporan	194,685,417	
7.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	20 Orang	438,178,850			20 Orang	238,401,364	
q.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	438,178,850			20 Orang	238,401,364	
8.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Satpol PP	20 Paket	1,066,580,400			20 Paket	1,135,819,317	
r.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Paket	1,066,580,400			20 Paket	1,135,819,317	
9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan	883,771,032			1 Laporan	915,929,519	
s.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	883,771,032			1 Laporan	915,929,519	
					12,278,777,615				13,690,070,157	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sejalan dengan Misi Provinsi Gorontalo, Mewujudkan Pemerintah Daerah Gorontalo yang Amanah, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 terdiri atas 3 (tiga) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 12.278.777.615,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel IV sebagai berikut :

Tabel IV
Rencana Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Gorontalo

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Provinsi Gorontalo		12,278,777,615		SATPOL PP
I	Program	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	100%	4,114,026,235	APBD	
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Provinsi Gorontalo	100 Pelanggaran/Pengaduan	3,319,919,322		
a.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		100 Kasus	2,334,052,804		
b.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		10 Kasus	542,885,933		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		1 Dokumen	10,834,371		
d.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	137,070,425		
e.	Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		50 Orang	165,293,191		
f.	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Keitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		2 Dokumen	105,720,661		
g.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		1 Laporan	24,061,937		
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	Provinsi Gorontalo	15 Perda/Perkada	696,731,748		
h.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		15 Laporan	491,715,439		
i.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		6 Laporan	205,016,309		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	Provinsi Gorontalo	50 Orang	97,375,165		
j.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		1 Laporan	64,942,549		
k.	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif		4 Dokumen	32,432,616		
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	Provinsi Gorontalo	100%	455,153,848	APBD	
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	383,926,600		
i.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, ANtar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		1 Dokumen	353,184,000		
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)		50 Orang	30,742,600		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	30 Laporan	71,227,248		
m.	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		30 Laporan	71,227,248		
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	7,709,597,532	APBD	
5.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	Satpol PP	8 Dokumen	72,227,100		
n.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	37,653,450		
o.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	34,573,650		
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	4 Laporan	5,248,840,150		
p.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/Bulan	5,149,747,200		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
q.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		4 Laporan	99,092,950		
7.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	20 Orang	438,178,850		
r.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	438,178,850		
8.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Satpol PP	20 Paket	1,066,580,400		
s.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Paket	1,066,580,400		
9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan	883,771,032		
t.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	883,771,032		
					12,278,777,615		

BAB V

PENUTUP

4. 1. Catatan penting yang mendapatkan perhatian

Didalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk Tahun 2025 ini, ada beberapa kegiatan yang anggaran belanjanya ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan karena dianggap urgen atau penting sehubungan dengan peningkatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

4. 2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan satuan anggaran yang tersedia serta aturan–aturan yang berlaku atau berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Demikian RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk bisa dijadikan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Atas segala kekurangan dalam hal penyajian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Atas saran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, Mei 2024

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO



MASRAN RAUF, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197802041996121002

LAMPIRAN

Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Gorontalo
Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		✓	Tidak ada usulan dari masyarakat	Melakukan Rapat Forum dengan Satpol PP Kab/kota serta melibatkan tokoh masyarakat
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada		
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	✓			

Gorontalo, Mei 2024

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO



LAMPIRAN IV

DAFTAR USULAN AKTIVITAS PRIORITAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	100 Kasus	Rp. 707,310,000		
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Gorontalo	10 Kasus	Rp. 83,974,000		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	Rp. 243,017,000		Sekretariat PPNS
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	50 Orang	Rp. 90,000,000		Sosialisasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan	Rp. 16,150,000,000		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung Kantor 16.000.000.000 - Hanggar Rp. 150.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	20 Paket	Rp. 2,200,000,000		<ul style="list-style-type: none"> - Kenderaan Patroli (Single Cabin) 450.000.000 - Kenderaan Mobil Damkar Rp. 1.700.000.000 - Perlengkapan Pakaian dan Peralatan Mercin Band Rp. 50.000.000
TOTAL					Rp19,474,301,000		

KEPALA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI GORONTALO

MASRAN RAUF, S.STP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197802041996121002